



Jurnal Nasional Pariwisata

Pengembangan DSP Labuan Bajo: Sebuah *Quantum Leap*

Arkan Syafera

Departemen Antropologi, Universitas Gadjah Mada

**Corresponding email:*
arkansyafera@gmail.com

Abstrak

Akselerasi pengembangan DSP (Destinasi Super Prioritas) Labuan Bajo ternyata membuat banyak pelaku wisata perlu menembus batas potensinya agar dapat mengikuti akselerasi yang sudah berjalan. Proses belajar terhadap dunia kepariwisataan memerlukan waktu yang tidak sebentar, tetapi pembangunan terus masif meskipun pondasi wisata di sana belum begitu kuat. Ini menjadi persoalan tersendiri. Untuk mendalaminya, riset ini memiliki dua pertanyaan utama: a) bagaimana akselerasi pariwisata Labuan Bajo?; dan b) bagaimana reaksi dari para pelaku wisata terhadap akselerasi pariwisata Labuan Bajo?. Data dicari dengan menggunakan metode studi pustaka, observasi partisipan, dan wawancara mendalam. Hasilnya, *quantum leap* pariwisata Labuan Bajo tidak dilandasi oleh adanya pertumbuhan populasi secara internal, tetapi justru ada untuk memancing pertumbuhan populasi, dalam hal ini wisatawan.

Kata kunci: akselerasi pembangunan, pengembangan pariwisata, Labuan Bajo, *quantum leap*, masyarakat lokal

Abstract

The acceleration in the development of DSP (Super Priority Destinations) in Labuan Bajo has apparently meant that many tourism actors need to push the limits of their potential to keep up with the acceleration that is already underway. The process of learning about the world of tourism takes a long time, but development continues to be massive even though the tourism foundation there is not yet very strong, that was a problem. To explore this, this research has two main questions: a) how is Labuan Bajo tourism accelerated?; and b) how do tourism actors react to the acceleration of Labuan Bajo tourism? Data was searched using literature study methods, participant observation and in-depth interviews. As a result, Labuan Bajo's tourism quantum leap is not based on internal population growth, but instead exists to stimulate population growth, in this case tourists.

Keywords: *accelerated development, tourism development, Labuan Bajo, quantum leap, local communities*

PENDAHULUAN

KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Labuan Bajo merupakan satu dari 10 “Bali Baru” yang dibentuk oleh negara untuk menyokong perkembangan Indonesia. Kesepuluh “Bali Baru” tersebut lalu dikerucutkan lagi menjadi 5 Destinasi Super Prioritas (DSP) atau yang biasa disebut juga dengan wisata premium, salah satunya DSP Labuan Bajo yang memiliki potret alam menawan sebagai daya tarik utamanya. Dilansir dari web resmi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (2022), Presiden Joko Widodo secara khusus memberikan enam arahan dalam rangka percepatan pengembangan DSP Labuan Bajo, yakni pengaturan dan pengendalian tata ruang; terkait akses dan konektivitas menuju tujuan wisata; fasilitas di lokasi wisata di mana perlu adanya penataan pedagang kaki lima, restoran-restoran kecil, dan toilet (standar bintang empat); peningkatan kualitas SDM termasuk dalam hal budaya

kerja, budaya melayani, dan budaya kebersihan; perluasan pemasaran produk lokal; serta promosi DSP secara besar-besaran dan terintegrasi. Akan tetapi, akselerasi pengembangan DSP Labuan Bajo ternyata menimbulkan gemuruh yang membuat banyak pelaku wisata Labuan Bajo perlu menembus batas potensinya agar dapat mengikuti akselerasi yang sudah berjalan. Sebagai respon terhadap fenomena tersebut, tulisan ini berupaya memaparkan reaksi dari masyarakat dan pihak terkait terhadap akselerasi pariwisata DSP Labuan Bajo yang sedang terjadi.

Tulisan terdahulu tentang Labuan Bajo terbatas pada analisis tentang aktivitas pariwisata dan keberhasilan pengembangannya (Yudhoyono *et al.*, 2021b) dari periode satu ke periode lain. Berdasarkan penelusuran, studi tentang Labuan Bajo mengalami peningkatan drastis setelah komodo ditetapkan sebagai *One of the Seven Wonders of Nature* pada tahun 2012. Kecenderungan literatur yang ada lebih membahas pada tiga hal. *Pertama*, kajian-kajian terkait dengan komponen produk pariwisata yang terdiri dari atraksi wisata, aksesibilitas, amenities, dan kelembagaan (Erb, 2013; Widaningrum dan Damanik, 2016) beserta keberlangsungan pariwisatanya (Nusraningrum *et al.*, 2023; Fatina, Soesilo dan Tambunan, 2023; Dwipayanti *et al.*, 2022). *Kedua*, studi-studi yang menganalisis risiko yang mengancam keberlangsungan aktivitas pariwisata Labuan Bajo khususnya risiko alam alam (Wibowo, 2022; Cole, 2017) dan bisnis (Setyoko dan Kristiningrum, 2019) beserta resiliensinya (Damanik *et al.*, 2023). *Ketiga*, kajian-kajian tentang konflik agraria yang terjadi akibat pengembangan pariwisata Labuan Bajo yang begitu masif (Teku *et al.*, 2022; Utama *et al.*, 2022; Ferdian *et al.*, 2020). Dari sekian studi yang ada, keberhasilan pariwisata Labuan Bajo lebih didasarkan pada angka percepatannya, tanpa banyak melihat pada kesulitan adaptasi dari para winisatawan.

Tulisan ini hadir untuk mengisi kekosongan studi terdahulu dengan melakukan penajaman pada perkembangan pariwisata Labuan Bajo dari waktu ke waktu dan reaksi dari para pelaku wisata di dalamnya terhadap masifnya perkembangan tersebut. Untuk itu, dibuat dua pertanyaan utama yang akan membingkai seluruh pembahasan tentang topik tersebut: a) bagaimana akselerasi pariwisata Labuan Bajo?; dan b) bagaimana reaksi dari para pelaku wisata terhadap akselerasi pariwisata Labuan Bajo?. Jawaban dari kedua pertanyaan tersebut penting untuk memberikan fakta lain di balik geliat pariwisata Labuan Bajo, yakni tentang tergo-poh-gopohnya para pelaku wisata di Labuan Bajo dalam memenuhi berbagai target Labuan Bajo sebagai Destinasi Super Prioritas. Artikel ini meminjam istilah *quantum leap* yang sebelumnya lebih banyak digunakan dalam studi-studi transformasi digital (Nugrahayu *et al.*, 2022; Idrus *et al.*, 2023) padahal gejala sosial dalam ranah pariwisata prioritas juga mengalami “lompatan jauh” semacam itu. Di dalam tulisan ini, pembahasan tentang “lompatan jauh” pariwisata Labuan Bajo dimulai dari peninjauan literatur yang terkait dengan pariwisata Labuan Bajo, pendalaman konsep *quantum leap*, uraian tentang percepatan pengembangan pariwisata Labuan Bajo, pemaparan tentang reaksi dari para pelaku wisata terhadap akselerasi pariwisata Labuan Bajo, lalu kesimpulan dan saran pada bagian terakhir.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata telah dilihat sebagai kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas tinggi (Wang *et al.*, 2023) yang inklusif dan berkelanjutan (Sayuti, 2023).

Rini (2019) pun memahami pengembangan pariwisata sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, serta menjadi strategi peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal. Menurut Wang *et al.* (2023), perkembangan pariwisata bersifat dinamis dan non-linear. Berdasarkan kesimpulan dari riset yang dilakukan, terdapat hubungan antara kepuasan penduduk lokal dan ketersediaan peluang usaha baru, pengembangan dan pemeliharaan hubungan baik antara penduduk lokal, penduduk asing, dan wisatawan, serta suasana internasional yang timbul sebagai hasilnya (González *et al.*, 2019). Pembangunan pariwisata berkelanjutan sangat penting, sementara dukungan masyarakat adalah kunci keberhasilan (Man Cheng *et al.*, 2022) sehingga tingkat kesiapan masyarakat dalam melakukan pengembangan pariwisata perlu diperhatikan, misalnya melalui pendidikan (Sayuti, 2023). Secara khusus, Zulherman *et al.* (2020) menemukan bahwa kesadaran masyarakat sepenuhnya memediasi hubungan antara ketergantungan ekonomi pada pariwisata dan dukungan terhadap pengembangan wisata. Sementara itu, González, Gascó dan Llopis (2019) tidak hanya menyebut ekonomi, tetapi juga konsekuensi pengembangan pariwisata yang bersifat sosial budaya dan lingkungan. Kemudian, Sayuti (2023) menambahkan *stakeholder* yang juga berperan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan yang terdiri dari pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan media. Dampak pengembangan pariwisata lalu dikaitkan dengan kepuasan penduduk lokal terhadap kotanya (González *et al.*, 2019).

2. Pariwisata Labuan Bajo

Berdasarkan letaknya yang strategis, Labuan Bajo disebut sebagai segitiga emas antara Pulau Komodo dan Tanah Toraja sebagai sektor pariwisata nasional (Wulandari *et al.*, 2023). Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi wisata super prioritas yang diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan mancanegara sehingga menambah devisa negara (Haris *et al.*, 2023). Prioritas terhadap Labuan Bajo kemudian dikemas dalam agenda pembangunan nasional Indonesia (Yudhoyono *et al.*, 2021a). Namun kontribusi pariwisata di Labuan Bajo terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar masih kurang optimal meskipun sudah banyak upaya untuk berdiri di sekitar kawasan wisata Labuan Bajo (Yudhoyono *et al.*, 2021a). Hasil analisis kinerja keuangan menunjukkan pendapatan yang relatif tinggi pada usaha pariwisata yang sudah lama beroperasi (Yudhoyono *et al.*, 2021a). Mereka didanai oleh pinjaman bank, mempunyai modal besar, mengadopsi teknologi informasi, dan menjadi anggota organisasi pariwisata tertentu (Yudhoyono *et al.*, 2021a). Secara umum kinerja keuangan usaha pariwisata di Labuan Bajo belum optimal, khususnya dalam mengelola aset untuk mendapatkan keuntungan (Yudhoyono *et al.*, 2021a).

3. Quantum Leap

Pertumbuhan populasi secara terus-menerus pada abad ini dilihat oleh Afzaal dan Nazir (2014) sebagai latar belakang dipilihnya *quantum leap* oleh pemegang kebijakan. Dogma ini hadir dalam logika manusia setelah muncul ketimpangan jumlah penduduk dengan sumber daya pangan di alam, sehingga mau tidak mau harus melakukan *quantum leap* (Musthofa *et al.*, 2017) dengan teknik manajemen konsumsi yang efisien dengan interaksi pengguna yang minimal guna optimalisasi (Afzaal dan Nazir, 2014). Ciputra (2013) mengklaim *quantum leap* ini dapat mencapai kesejahteraan bangsa, termasuk mengurangi pengangguran. Menurut

Musthafa *et al.* (2017), *quantum leap* adalah lompatan penghayatan dan pemaknaan untuk mengejar kebutuhan pangan penduduk dunia. Menurutnya, budaya instan dan cepat harus menjadi pilihan agar jutaan umat manusia tidak mati karena kekurangan pangan, ini bertepatan dengan era industrialisasi. Sementara itu, Ashby dalam Yuliana dan Suryawan (2016) mendefinisikan *quantum leap* sebagai lompatan besar yang tidak mencakup perubahan bertahap, melainkan langsung menuju sasaran yang jauh berbeda dengan kondisi awal. Dalam tulisannya, Ashby dalam Yuliana dan Suryawan (2016) mengidentikkan *quantum leap* dengan revitalisasi.

Scarpello (2015) melihat *quantum leap* berkaitan dengan cara berpikir dan tata kelola selain soal rekonseptualisasi. Perkembangan ini melibatkan kerja sama dan persaingan transnasional dan internasional yang ketat, baik di sektor publik maupun swasta, melalui interaksi informal maupun formal dengan kebijakan (Davis Cross dan Pekkanen, 2023). Di sini, terjadi proses mendelegasikan kekuasaan atau dengan kata lain memberikan wewenang kepada orang lain untuk melakukan keputusan dapat membantu mendesain ulang suatu bisnis sehingga mampu membuat *quantum leap* dalam kinerja dan keuntungan (Idrus *et al.*, 2023). Dalam hal ini, mendelegasikan kekuasaan dan restrukturisasi berarti mengubah proses dan budaya perusahaan untuk mendapatkan peningkatan efektivitas yang spektakuler (Idrus *et al.*, 2023). Dalam bidang pariwisata, *quantum leap* telah digaungkan sejak 2016 oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya sebagai respon dari rendahnya daya saing pariwisata Indonesia, yakni hanya berada pada peringkat 70 besar dari 144 negara dan peringkat keempat di ASEAN di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand (Wahudi, 2015). *Quantum leap* ini terwujud dalam strategis persiapan dan pelaksanaannya (Wahudi, 2015). Dalam hal ini, pentingnya semangat kewirausahaan bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pariwisata ditekankan oleh Wahudi (2015) dan Nugrahyu *et al.* (2022) agar wirausaha Indonesia tumbuh/berkembang (*growth*) dan berkelanjutan, budaya, kompetensi, serta interaksi diri menyesuaikan.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini berisi tentang agenda pembangunan bernuansa modern yang dibawa oleh Pemerintah pada pariwisata Labuan Bajo dengan target percepatan. Saya mengawali riset ini dengan kerja kepustakaan untuk mengetahui pengembangan-pengembangan pariwisata yang sudah dilakukan di DSP Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia—tepatnya terjadi pada masyarakat adat Mbehal di kawasan tersebut. Kemudian, riset lapangan dilakukan selama 2 bulan, yakni sejak tanggal 4 Agustus hingga 28 September 2023, dengan metode observasi partisipan dengan tinggal bersama pegiat pariwisata dan melakukan wawancara mendalam guna konfirmasi atas data-data yang didapat dari observasi dan studi literatur serta media. Data-data yang telah didapat dari unggahan resmi dari media kredibel di Indonesia, seperti Kompas.com, kemudian dielaborasi dengan keterangan dari informan perwakilan Dinas Pariwisata Manggarai Barat yang paham akan pariwisata, tokoh masyarakat yang paham akan kehidupan masyarakat di sekitar pariwisata, dan perwakilan warga sebagai sasaran pengembangan pariwisata Labuan Bajo. Ketiga informan tersebut mewakili setiap elemen yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata Labuan. Keterangan dari informan-informan tersebut ketika wawancara merupakan data primer yang kemudian disandingkan dengan data sekunder berupa pernyataan dari

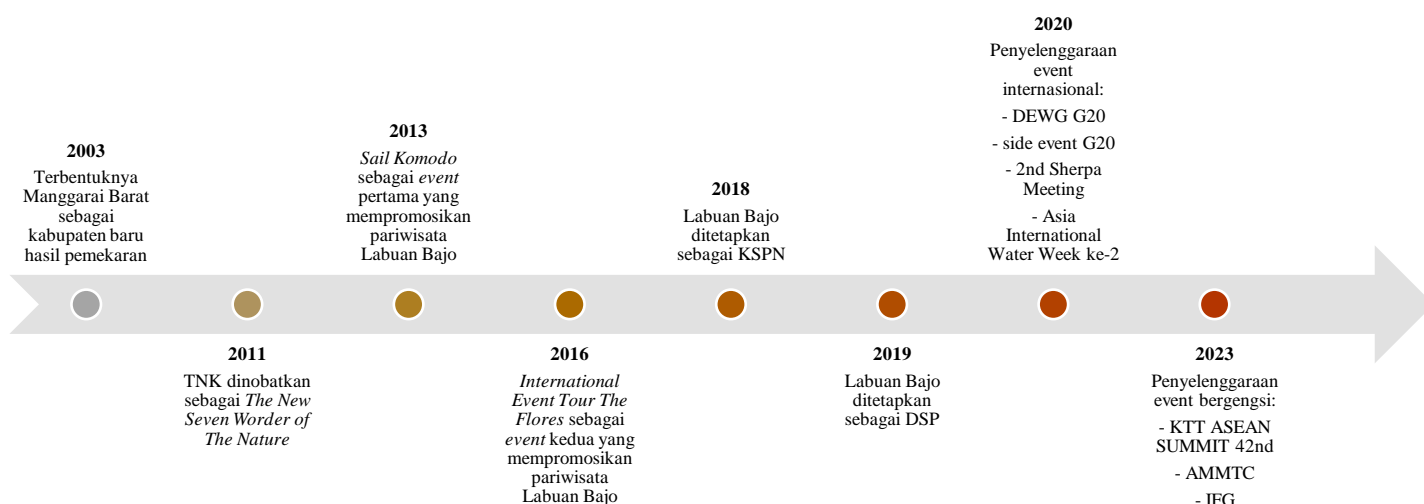
pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat maupun daerah yang didapat dari berbagai pemberitaan online.

Data yang ditemukan kemudian dipilah dan dipilih yang sesuai sehingga ditemukan pandangan masyarakat lokal terhadap akselerasi pengembangan pariwisata. Kajian semacam ini melibatkan telaah *dialectical logics*, etika, dan studi kontekstual (Khasan, 2015). Di samping aspek negatif dari pembangunan pariwisata, saya pun memperhatikan karakternya yang sering konstruktif, misalnya proses mengesampingkan masyarakat lokal dalam aktivitas pariwisata. Analisis datanya berupa analisis tekstual dari transkrip wawancara. Kata kunci penting ditemukan di mana penentuan kata kunci ini didasarkan pada bagian-bagian yang ditekankan oleh informan. Analisis ini pun erat kaitannya dengan interpretasi dengan maksud untuk memaknai bentuk dan proses *quantum leap* pariwisata Labuan Bajo. Setelah itu, dilakukan pencarian dan penemuan pola data hasil interpretasi. Hasilnya, data lebih terstruktur dan memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akselerasi Pengembangan Pariwisata Labuan Bajo

Destinasi Super Prioritas (DSP) Labuan Bajo sedang mengalami fase baru dalam proyek pembangunan. Sebagai DSP, Labuan Bajo meliputi 11 kabupaten dan Kawasan Cagar Biosfer Komodo dengan luas wilayah otorita seluas 400 Ha sebagai suatu kawasan pariwisata terpadu. Pada dasarnya, DSP Labuan Bajo telah memiliki aset utama yang sulit dimiliki oleh destinasi lain di Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya, yakni komodo atau *Varanus Komodoensis* (atau dalam bahasa lokal disebut *ora*) sebagai binatang purba berupa kadal raksasa terakhir sekaligus satu-satunya di dunia yang pertama kali diliput dalam jurnal ilmiah pada tahun 1912 oleh Pieter Antonie Ouwens, Direktur Museum Zoologi Bogor (Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 2022). Portal Informasi Indonesia (2018) mencatat ada sekitar 5.700 kadal raksasa yang masih lestari hingga kemudian UNESCO menobatkan Taman Nasional Komodo (Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau lain di sekitarnya) sebagai Situs Warisan Dunia pada tahun 1991. Pada tahun 1986, UNESCO juga menetapkan situs yang sama sebagai Cagar Biosfer (Portal Informasi Indonesia, 2018). Kemudian, pada tahun 2012, organisasi *New 7 Wonders* menetapkan Taman Nasional Komodo (TNK) sebagai satu dari tujuh “*The New Seven of Nature*”. Tidak hanya sampai pada kekayaan daratan, wisata bawah laut di kawasan tersebut juga mendapat predikat “*World’s Best Snorkeling Destinations*” (Portal Informasi Indonesia, 2018). Lalu, pada Majalah *National Geographic* edisi bulan Juli 2017, Labuan Bajo masuk dalam 10 destinasi terbaik di dunia (Portal Informasi Indonesia, 2018). Semua ini menegaskan Labuan Bajo sebagai wisata yang strategis.



Gambar 1. Timeline Pariwisata Labuan Bajo

Sumber: analisa peneliti, 2023

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) turun langsung untuk mengawal dan memastikan transformasi Labuan Bajo berjalan dengan baik dan mendatangkan manfaat bagi rakyat dan negara. Saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Plataran Komodo Resort, Labuan Bajo, pada tanggal 20 Januari 2020, Presiden menyampaikan tujuh arahan yang kemudian menjadi tonggak percepatan transformasi tersebut. Agenda utamanya adalah penataan kawasan dan infrastruktur. Secara cepat, jajaran kementerian dan lembaga terkait bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) serta pemangku kepentingan lainnya mengimplementasikan arahan Presiden tersebut. Tindak lanjut yang telah dilakukan antara lain: formulasi tujuh faktor kunci pariwisata (lingkungan, SDM, aktivitas, manajemen perjalanan, infrastruktur, amenities dan kesehatan, serta keamanan dan keselamatan); peningkatan infrastruktur pendukung konektivitas (perluasan Bandara Komodo; peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, trotoar, dan drainase; dan pembangunan Terminal Multipurpose Labuan Bajo); penataan kawasan (Waterfront City yaitu Zona A Bukit Pramuka, Zona B Kampung Air, Zona C Dermaga, Zona D kawasan Pantai Marina, dan Zona E Kampung Ujung); penyiapan SDM dan UMKM; peningkatan ketersediaan air baku; pembangunan Sistem Pengelolaan Sampah (SPS); keamanan wisatawan; dan promosi terintegrasi (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022).

Sebagai salah satu bentuk pemanfaatan potensi wisata yang ada di Labuan Bajo, Sekretariat Besama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata (Sekber Pariwisata) mengadakan Rapat Koordinasi *High Level* pada tahun lalu, tepatnya tanggal 3 Oktober 2022 di Jakarta. Dari 10 poin kesepakatan pada rapat itu, ada 4 langkah strategis yang secara eksplisit menginginkan adanya percepatan pariwisata serta ekonomi Nasional, termasuk untuk DSP Labuan Bajo, antara lain mencakup: a) mempercepat pembangunan Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang didukung oleh peningkatan dukungan amenities dan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan (*quality tourism*); b) melanjutkan pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas dan destinasi pariwisata lainnya yang didukung oleh alokasi anggaran dan pengaturan pengelolaan aset yang telah terbangun; c) meningkatkan sinergi dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions); dan d)

melanjutkan dukungan insentif dan peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) dan desa wisata, termasuk melalui dukungan kebijakan makroprudensial untuk sektor prioritas (Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 2022). Hal ini memperkuat hasil studi dari Wang *et al.* (2023) yang melihat pengembangan pariwisata sebagai kunci dari pertumbuhan ekonomi.

Segala potensi yang dimiliki oleh Labuan Bajo kemudian diupayakan agar dapat seoptimal mungkin memikat para wisatawan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2015 atau Ripparnas 2010-2025 sebagai dasar hukum dari upaya transformasi dalam bidang pariwisata di Labuan Bajo (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022). Untuk mempercepat transformasi tersebut, pemerintah membentuk Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOLF) melalui Perpres Nomor 32 Tahun 2018 dengan tujuan agar pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan pariwisata Labuan Bajo dan Flores lebih terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022). Pada pelaksanaannya, Dinas Pariwisata Manggarai Barat mempedomani diri dengan berbagai dokumen perencanaan sesuai dengan amanat peraturan di atasnya:

“Kami sendiri di luar ITMP, kemudian di luar Ripparda, kita juga kan mempedomani diri dengan RPJMD. Ada juga Renstra (Rencana Strategis). Itu semua penting untuk mendapat gambaran umum (tentang) bagaimana perencanaan pariwisata secara keseluruhan,” wawancara mendalam, perwakilan Dinas Pariwisata Manggarai Barat, 15 September 2023

“... Kalau di kami ada, dia masuk DPD apa, kemudian KSPD apa wilayah-wilayah di kecamatan (tersebut). Seperti yang kita sebut, kita lebih kepada temanya ... Melihatnya hanya sekilas. ‘o dia ada gua, o ya berarti tema wisata alam gua, cagar budaya, atau cagar alam’, gitu misalnya. Kita hanya sebatas di tema ... Basis kami si sebetulnya basis objek, di Ripparda itu basisnya objek si sebetulnya. Ada objek, dia masuk kawasan apa, dikembangkan, begitu. Karena yang kita intervensi kan ngga besar. tidak ada alih fungsi lahan yang besar. dia lebih kepada suatu objek, ada jalan masuk, oke kita bisa kembangkan,” wawancara mendalam, perwakilan Dinas Pariwisata Manggarai Barat, 15 September 2023

Pembangunan kepariwisataan daerah yang disusun dalam Ripparda didasarkan pada objek wisata kemudian ditentukan tema pengembangannya. Dalam Ripparda, Labuan Bajo dibagi menjadi 4 wilayah, di dalamnya ada 4 DPD (Destinasi Pariwisata Daerah), 113 KPPD (Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah), dan 26 KSPD (Kawasan Strategis Pariwisata Daerah). Namun demikian, pengembangan pariwisata seringkali luput dari aspek manusia beserta nilainya, misalnya stakeholder.

*“Dari pengalaman kami selama ini, kadang-kadang yang saya rasa, ketika kita mengurus pariwisata, kadang-kadang kita nggak kenal betul **stakeholder**-nya, siapa yang berpengaruh. Yang intinya siapa, kadang-kadang kita nggak kenal. Akhirnya, apa pun kebijakan yang masuk tidak akan menyentuh mereka secara bulat,” wawancara mendalam, perwakilan Dinas Pariwisata Manggarai Barat, 15 September 2023*

Pariwisata itu meliputi manusia, alam, dan kebijakan. Kita dapat merekayasa alam dengan kebijakan-kebijakan yang kita buat guna kepentingan manusia. Di sini, manusia yang seharusnya diposisikan sebagai inti dari segala aktivitas pariwisata, nyatanya tidak demikian. Wisata Labuan Bajo hanya berbasis pada alam dengan praktik-praktik pengabaian pada lokalitas masyarakat. Hal ini diperkuat oleh keterangan dari mantan camat Boleng sebagai informan, pada tanggal 10 Agustus 2023, yang mewakili masyarakat, “Dari satu sisi, berkembangnya Labuan Bajo menjadi super prioritas *ya* kita bersyukur, tetapi super premiumnya di Labuan Bajo ini secara umum tidak berbasis pada masyarakatnya sendiri. Itu hanya (berbasis) pada alam, anugerah Tuhan, tidak ada improvisasi budaya masyarakat lokal. Malah improvisasi masyarakat lokal dimatikan. Yang terjadi hanya rebutan keindahan alam. Lalu, tetesan rezeki super premium itu hanya sasarannya di keindahan alam itu. Pemainnya bukan orang lokal”. Keindahan alam yang dianugerahkan pada wilayah Labuan Bajo belum dapat bermanfaat sepenuhnya terhadap masyarakat lokal.

2. Reaksi dari Para Pelaku Wisata terhadap Akselerasi Pariwisata Labuan Bajo

Manggarai Barat sebagai kabupaten yang baru berusia 10 tahun pada 2013 sudah harus mengemban tugas berat sebagai salah satu penyangga pariwisata Indonesia dengan masifnya wisatawan mancanegara masuk setelah pengadaan *sail komodo*:

*“Ambil konteks Labuan Bajo, Labuan Bajo ini kan kabupaten yang usianya baru 20 tahun. 2003 kita (baru) jadi kabupaten. Nah kemudian, pariwisata mulai berkembang sebetulnya sudah lama sebelum itu sudah ada aktivitas pariwisata di sini. Dia bertumbuh-bertumbuh. Kemudian, mulai populer pada saat 2013, itu ada sail (komodo) Indonesia, jadi ada momentum-momentumnya dalam perkembangannya. Kemudian, terakhir datang keputusan untuk menjadikan kita destinasi prioritas, 10 ‘Bali baru’. Kemudian, 10 destinasi prioritas, kemudian jadi superprioritas. Nah, begitu jadi prioritas/superprioritas, itu kan infrastruktur dibangun **masif** di sini, **cepat sekali Bergeraknya. Super cepat.** Semua berubah. Tapi, kita ini masih banyak lemah di berbagai sektor, pertanian masih lemah, sektor SDM juga masih lemah. Kalau disimpulkan begini, **pariwisata Manggarai Barat dibangun di atas pondasi yang belum kuat.** Pondasi yang masih rapuh sebenarnya,” wawancara mendalam, perwakilan Dinas Pariwisata, 15 September 2023*

“Saya dapat istilah bagus dari mereka yang membuat pelatihan tingkat nasional di sini, mereka bilang quantum leap, lompatan jauh dan cepat. nah, kita ini belum bisa lompatan jauh dan cepat, tetapi sudah harus masuk dalam keadaan itu. Makanya di sana sini SDMnya masih sangat lemah. Barangkali bisa diistilahkan kaget (shock). Cepat sekali berkembangnya, sementara kita belum bisa melompat jauh, masih kurang di sana sini,” wawancara mendalam, perwakilan Dinas Pariwisata, 15 September 2023

Baru selisih 5 tahun setelah *sail komodo*, Labuan Bajo sudah harus menyiapkan diri sebagai suatu KSPN atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Satu tahun kemudian, Labuan Bajo secara drastis naik status sebagai Destinasi Super Prioritas (DSP). Perubahan yang paling mencolok sebatas pada pembangunan infrastruktur yang begitu masif. Sebagaimana yang dikatakan oleh perwakilan Dinas Pariwisata Manggarai Barat, infrastruktur di Labuan Bajo

dibangun secara masif, cepa sekali, super cepat, dan semua berubah. Sementara itu, pondasi pariwisata di sana belum kuat. Sebut saja sektor pertanian Manggarai Barat yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal, apalagi wisatawan. Berdasarkan obeservasi di lapangan, diketahui bahwa sayur dan buah-buahan didatangkan dari Ruteng, Manggarai bagian tengah. Bahkan, sebagian yang lain dari Bima. Inilah yang membuat harga bahan pangan pokok begitu tinggi di Labuan Bajo. Tidak hanya sayur, buah, dsb, harga ayam potong juga mencapai Rp50.000,-/kg di saat ayam potong di Yogyakarta masih ada kisaran harga Rp28.000,-. Di sisi lain, masyarakat belum sepenuhnya berhasil beralih dari pertanian ke pariwisata.

*“... kadang-kadang masih dalam tanda petik itu **terperangah**. Lalu, ‘saya bikin apa’. Kemudian, muncul pertanyaan, ‘lho, orang lain menikmati ini ya, saya lalu apa, **saya bisa bikin apa**’. Keinginan belajarnya itu ada, tetapi kadang-kadang nggak tau saya bisa tanya kemana, harus mulai dari mana, nah mungkin itu yang harus disentuh lebih jauh. Wah ada ini ya, ada itu. Ketika diskusi lebih dalam, baru kita buat apa, siapa yang menikmati pariwisata sebenarnya,” wawancara mendalam, perwakilan Dinas Pariwisata Manggarai Barat, 15 September 2023*

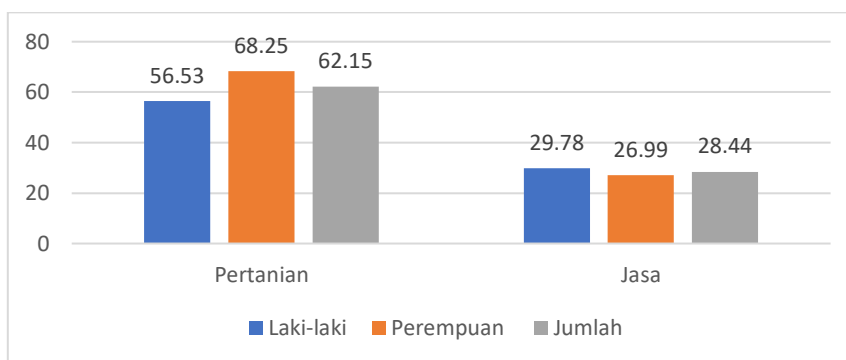
“Secara gamblang saja. Sedikit sekali masyarakat lokal yang terakomodir dalam keuntungan pariwisata Labuan Bajo. Contoh saja, travel kapal di laut. Masyarakat lokal sedikit sekali kok. Pengusaha kapalnya dari luar, guide-guide-nya dari luar, ada si orang lokal tetapi tidak seberapa. Kemudian, karyawan-karyawan hotel itu dari Jawa, Bali, NTB. Sedikit sekali orang-orang lokalnya,” wawancara mendalam, mantan camat Boleng, 10 Agustus 2023

*“... di daerah-daerah pesisir itu, oleh **investor** akan diubah untuk destinasi pariwisata, baik itu untuk membangun restoran, hotel,” wawancara pegiat pariwisata, 3 September 2023*

“Orang membeli tanah dengan melihat pengembangan kota dan kepariwisataan. Sebetulnya, kami bisa kontrakan untuk membuat homestay. Seperti pelabuhan itu, saya ingin membuat homestay di depan pelabuhan, tetapi belum ada duit,” wawancara mendalam, warga 1, 10 Agustus 2023

Investor masih sebagai pelaku utama di DSP Labuan Bajo. Di sisi lain, masyarakat lokal masih cenderung terperangah dengan perkembangan yang terjadi. Selain investor, para pelaku usaha di kawasan pariwisata dan sekitarnya merupakan orang perantauan dari Jawa, Bali, atau Nusa Tenggara Barat. Secara keseluruhan, gencar dan luasnya pemasaran pariwisata Labuan Bajo hingga ke tingkat internasional ternyata belum mampu menampung tenaga kerja di Manggara Barat secara keseluruhan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Manggarai Barat (2022) tentang Pengangguran Terbuka, 2020-2022, tercatat angka pengangguran mencapai 7.770 jiwa pada tahun 2022, padahal sebelumnya hanya 6.941 jiwa pada tahun 2021 dan 5.506 jiwa pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata yang kian masif berbanding terbalik dengan jumlah pengangguran. Wisata Labuan Bajo yang didesain premium justru telah ‘menjauhkan’ masyarakat lokal untuk mengaksesnya karena 16,82

persen dari keseluruhan penduduk Manggarai Barat masih berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat, 2023).



Gambar 2. Perbandingan Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di Sektor Pertanian dan Jasa

Sumber: diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat (2022)

Dikutip dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat (2022), sebanyak 62,15 persen penduduk Manggarai Barat di atas usia 15 tahun masih bergelut dalam bidang pertanian. Dalam hal ini, pertanian (sektor primer) yang dimaksud juga mencakup perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan/*agriculture, forestry, hunting, and fisheries*. Sementara itu, penduduk yang bergerak dalam sektor pertanian baru sekitar 28,44 persen. Jasa ini digolongkan dalam sektor tersier yang mencakup perdagangan, rumah makan, jasa akomodasi, transportasi, pergudangan dan komunikasi, lembaga keuangan, *real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan/*wholesale trade, retail trade, restaurants and hotels, transportation, warehousing, and communication, financing, insurance, business services, and public service*. Beberapa pekerjaan dalam bidang jasa ini erat kaitannya dengan pariwisata, tetapi angkanya kecil. Tak hanya tidak sepenuhnya dilibatkan pada sektor pariwisata, pengembangan pariwisata kemudian telah mencaplok tanah milik warga untuk pembangunan jalan trans menuju wisata Golo Mori tanpa ganti rugi hingga saat ini hingga menimbulkan perlawanan dari masyarakat:

“Kemudian, perlawanan yang lain tentang masalah tanah. Kalau arah ke selatan, memang ada penggusuran (untuk) jalan menuju ke daerah pariwisata Golo Mori, masyarakat melawan menuntut ganti rugi. Pemerintah tidak mau menuntut ganti rugi tanahnya masyarakat. bahkan rumah digusur, tidak ada ganti ruginya. Sawah digusur, tidak ada ganti ruginya. Masyarakat kan menyambung hidup dengan mengelola tanahnya. Tanah sepotong di pinggir jalan, dikelola. Kok tidak ada ganti rugi,” wawancara mendalam, mantan camat Boleng, 10 Agustus 2023

Akselerasi pengembangan pariwisata dengan target percepatan telah membuat persoalan yang ada di masyarakat diabaikan begitu saja. Masyarakat kehilangan sumber penghidupan aslinya sebagai petani karena tanah pertanian telah diubah menjadi fasilitas-fasilitas pariwisata, termasuk jalan penunjang konektivitas wisatawan. Pada saat yang sama, mereka belum bisa terserap secara optimal dalam aktivitas pariwisata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat lokal Labuan Bajo bukan sepenuhnya tanpa kesadaran terhadap pariwisata

(Zulherman *et al.*,2020), tetapi jargon pariwisata premium telah lebih dahulu membatasi mereka pada peluang-peluang strategis pariwisata sehingga masyarakat seperti tidak akan pernah memenuhi standar dari para pemangku kepentingan pariwisata di sana.

Ketua BPOLBF Shana Fatimah, dalam acara Economic Outlook 2022 yang diselenggarakan Berita Satu Media Holding (BSMH) pada tanggal 23 November 2023, mengatakan bahwa peningkatan kunjungan wisatawan setelah Labuan Bajo ditetapkan sebagai destinasi pariwisata pada tahun 2016 harus direspon dengan mendorong dinas terkait melakukan standarisasi internasional, “kami melihatnya sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas. Destinasi wisata memberikan pengalaman luar biasa dan membuat Anda menginginkan lebih. Makanya kami punya *hashtag* #RinduLabuanBajo” (PwC Indonesia, 2021). Oleh karena itu, pengembangan Labuan Bajo dirancang dengan mengintegrasikan konsep tata ruang, pariwisata, dan kemewahan yang akan memberikan pengalaman tak terlupakan bagi wisatawan. Dari pernyataan tersebut, kata kemewahan menjadi rancu. Dinas terkait memaknai kemewahan sebagai internasionalisasi. Hampir semua serba *western*. Kelokalan dan adat tidak dimasukkan dalam istilah “kemewahan” tersebut apalagi ketika dihadapkan dengan fakta bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur terus masuk sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Pada tahun 2023, Nusa Tenggara Timur menduduki posisi ketiga provinsi termiskin di Indonesia dengan persentase penduduk miskin 19,96 persen, jumlah penduduk miskin 1.141.110 jiwa, dan garis kemiskinan per kapita Rp507.203 per bulan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023).

Tidak sama dengan studi Afzaal dan Nazir (2014) yang menyatakan bahwa *quantum leap* dilandasi oleh adanya pertumbuhan populasi secara internal, *quantum leap* di Labuan Bajo justru ada untuk memancing pertumbuhan penduduk, dalam hal ini wisatawan yang padat. Studi ini juga tidak sesuai dengan klaim dari Ciputra (2013) yang menyatakan bahwa kesejahteraan bangsa termasuk pengurangan pengangguran dapat tercapai dengan *quantum leap*. SDM pariwisata secara khusus dan masyarakat lokal secara umum belum tersiapkan dengan baik sehingga mereka belum banyak terserap dalam kegiatan pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan persentase orang yang bekerja di sektor pertanian masih jauh lebih tinggi dibanding sektor jasa termasuk di dalamnya sektor pariwisata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa *quantum leap* yang terjadi di Labuan Bajo bukan berupa lompatan penghayatan dan pemaknaan sebagaimana yang dituliskan oleh Musthofa *et al.* (2017), melainkan lebih cenderung pada lompatan perubahan secara fisik dalam rangka fasilitasi wisatawan dengan standar internasional. Minim sekali penghayatan dan pemaknaan terhadap lompatan pariwisata Labuan Bajo itu sendiri dengan praktik-praktik pengabaian terhadap eksistensi masyarakat lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengembangan kawasan pariwisata Labuan Bajo ternyata tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Pertumbuhan pariwisata begitu cepat terutama sejak Labuan Bajo ditetapkan sebagai KSPN pada tahun 2018, kemudian hanya berselang satu tahun kemudian Labuan Bajo ditetapkan sebagai DSP pada tahun 2019. Pada tahun 2020, event internasional dengan lingkup asia sudah terus diadakan di Labuan Bajo. Lalu, pada tahun 2023, event berengsi seperti KTT ASEAN Summit 42nd, AMMTC, dan IFG juga dilaksanakan di

Labuan Bajo. Pertumbuhan Labuan Bajo tersebut kurang diimbangi dengan tingginya inovasi dan inisiatif dari masyarakat di sekitar secara umum. Pertanyaan “saya bisa membuat apa untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas pariwisata” belum banyak terjawab oleh mereka sendiri. Pelaku utama pariwisata dari luar daerah Manggarai lebih dominan dibanding warga lokal sendiri. Sementara itu, tanah warga lokal di sekitar geliat pariwisata sudah lebih dahulu dikuasai investor. Di sisi lain, hak warga lokal terganggu akibat pengembangan kawasan. Sebagai contoh, jalan trans menuju wisata Golo Mori yang menggusur tanah milik warga ternyata belum diganti rugi sampai saat ini. Semua ini telah menggambarkan situasi masyarakat di tengah percepatan pariwisata Labuan Bajo. Ini merupakan persoalan yang kompleks.

Penulis memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Untuk dinas pariwisata dan dinas lain yang terkait dengan pengembangan pariwisata, perlu ada kesepakatan dan komitmen untuk menempatkan manusia sebagai perhatian utama. Saya mengutip pernyataan dari perwakilan Dinas Pariwisata Manggarai Barat yang menyatakan bahwa sesuatu yang bijak dapat dihasilkan jika disepakati dan diaplikasikan oleh seluruh aktor pembangunan pariwisata. Pariwisata itu melibatkan manusia, alam, dan kebijakan. Kita perlu sepakat untuk menaruh manusia di urutan pertama dan pada posisi inti. Manusia harus menjadi fokus utama supaya kita bisa merekayasa alam untuk kepentingan manusia dengan kebijakan-kebijakan yang kita buat. Kita taruh manusia dengan nilainya sebagai pusat. Jika *stakeholder* (manusia) dapat dikelola dengan baik, kita lebih mudah merekayasa kebijakan apa pun. Pendekatan *bottom-up* dapat menjadi pilihan utama.

Tulisan ini telah berkontribusi dalam melengkapi literatur terdahulu tentang pariwisata Labuan Bajo. Ketika studi terdahulu telah banyak membahas komponen produk pariwisata yang terdiri dari atraksi wisata, aksesibilitas, amenitas, dan kelembagaan (Erb, 2013; Widaningrum dan Damanik, 2016) beserta keberlangsungan pariwisatanya (Nusraningrum *et al.*, 2023; Fatina, Soesilo dan Tambunan, 2023; Dwipayanti *et al.*, 2022), tulisan ini mengungkap tantangan bagi masyarakat di sekitar lokasi wisata yang terkendala dalam mendapat manfaat dari aktivitas wisata secara maksimal. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi dinas pariwisata di lokasi yang bersangkutan agar terus menaruh perhatian khusus pada penguatan sumber daya manusia sebagai pelaku wisata. Akan tetapi, penelitian ini masih terbatas pada persepektif dari laki-laki tentang pengembangan pariwisata yang sedang masif ternyata di Labuan Bajo. Penelitian selanjutnya dapat mencoba menggali suara perempuan dalam hal ini apalagi dengan berbagai masalah di sana, terutama krisis air, yang pastinya akan semakin parah ketika hotel terus dibangun dan hutan digunduli demi memenuhi target peluasan kawasan pariwisata atau pembukaan destinasi baru seperti Hutan Bowosie yang merupakan sumber mata air bagi kurang lebih 11 mata air di Kota Labuan Bajo, tetapi dialihfungsikan menjadi *ecotourism*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzaal, A., & Nazir, M. (2014). GreenNet: Agent based game-theoretic domestic cost optimization technMAFIAlques for smart grid. *Life Science Journal*.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat. (2022). *Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Manggarai Barat 2022*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat. (2023). *Kemiskinan 2021-2023*. <https://manggarai Barat kab.bps.go.id/indicator/23/53/1/kemiskinan.html>
- Badan Pusat Statistik Manggarai Barat. (2022). *Pengangguran Terbuka (Jiwa), 2020-2022*. <https://manggarai Barat kab.bps.go.id/indicator/6/61/1/pengangguran-terbuka.html>
- Ciputra. (2013). *Ciputra Quantum Leap*. Alex Media Komputindo.
- Cole, S. (2017). Water worries: An intersectional feminist political ecology of tourism and water in Labuan Bajo, Indonesia. *Annals of Tourism Research*. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2017.07.018>
- Damanik, F. K., Ulinnuha, H., Sonia, C. R., & Nurhalisa. (2023). Digitalization for Tourism Resiliency (Case Study: Labuan Bajo). *Lecture Notes in Networks and Systems*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26956-1_71
- Davis Cross, M. K., & Pekkanen, S. M. (2023). Introduction. Space Diplomacy: The Final Frontier of Theory and Practice. In *The Hague Journal of Diplomacy*. <https://doi.org/10.1163/1871191x-bja10152>
- Departemen Komunikasi Bank Indonesia. (2022). https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2426322.aspx. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2426322.aspx
- Dwipayanti, N. M. U., Nastiti, A., Johnson, H., Loehr, J., Kowara, M., Rozari, P. de, Vada, S., Hadwen, W., Nugraha, M. A. T., & Powell, B. (2022). Inclusive WASH and sustainable tourism in Labuan Bajo, Indonesia: needs and opportunities. *Journal of Water Sanitation and Hygiene for Development*. <https://doi.org/10.2166/washdev.2022.222>
- Erb, M. (2013). Gifts from the other side: Thresholds of hospitality and morality in an eastern Indonesian town. *Oceania*. <https://doi.org/10.1002/ocea.5026>
- Fatina, S., Soesilo, T. E. B., & Tambunan, R. P. (2023). Collaborative Integrated Sustainable Tourism Management Model Using System Dynamics: A Case of Labuan Bajo, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*. <https://doi.org/10.3390/su151511937>
- Ferdian, K. J., Idrus DM, I. A., & Tondo, S. (2020). Dampak Ekowisata Bahari dalam Perspektif Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan Pesisir. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*. <https://doi.org/10.31506/jipags.v3i1.5480>
- Gabur, M. F. A., & Sukana, M. (2020). Manajemen Pariwisata di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo. *JURNAL DESTINASI PARIWISATA*. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2020.v08.i02.p23>
- González, R., Gascó, J., & Llopis, J. (2019). Local residents' perception about tourism and foreign residents: A Spanish case study. *Psychology and Marketing*. <https://doi.org/10.1002/mar.21259>

- Haris, K. A., Tilottama, R. D., Robbani, M. H., & Yuliani, M. (2023). Potential quantity of liquid fuel from pyrolysis of plastic waste in Labuan Bajo. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1201/1/012011>
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022). *Tujuh Arahkan Presiden dan Transformasi Labuan Bajo Sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas*. <https://setkab.go.id/tujuh-arahan-presiden-dan-transformasi-labuan-bajo-sebagai-destinasi-pariwisata-super-prioritas/>
- Idrus, S., Suharyanto, S., Herlina, R. L., Sekarningtyas, H., & Mas'ud, M. I. (2023). Initiating A New Model In Compatible Human Resource Management In The Era Of The Industrial Revolution 4.0. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*. <https://doi.org/10.15575/jim.v4i1.23638>
- Khasan, B. I. (2015). An Experience of Applied Conflictology. *Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences*. <https://doi.org/10.17516/1997-1370-2015-8-11-2789-2797>
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. (2022). *Labuan Bajo – Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang Merupakan Salah Satu Fokus dari Program Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dalam Daftar Proyek Strategis Nasional*. <https://kppip.go.id/berita/labuan-bajo-destinasi-pariwisata-super-prioritas-yang-merupakan-salah-satu-fokus-dari-program-pengembangan-kawasan-strategis-nasional-dalam-daftar-proyek-strategis-nasional/>
- Man Cheng, E. N., So, S. I., & Nang Fong, L. H. (2022). Place Perception and Support for Sustainable Tourism Development: The Mediating Role of Place Attachment and Moderating Role of Length of Residency. *Tourism Planning and Development*. <https://doi.org/10.1080/21568316.2021.1906740>
- Musthofa, Z. A., Husamah, Hudha, A. M., Muttaqin, T., Hasanah, I., & Setyawan, D. (2017). *Mengurai Sengkarut Bencana Lingkungan*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nugrahayu, H., Wasistiono, S., Rowa, H., & ... (2022). Bureaucracy Reform through Transformation of Public Services at the Department of Investment and One Door Integrated Services (Case Study in the City of Palangka *Institute (BIRCI-Journal*
- Nusraningrum, D., Mekar, T. M., Endri, E., & Ahmad, F. S. (2023). Does implementing green operation management affect the Sustainability of port operations in Labuan Bajo? *Uncertain Supply Chain Management*. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.8.005>
- Portal Informasi Indonesia. (2018). *Komodo dan Taman Wisata Komodo*. <https://indonesia.go.id/kategori/seni/131/komodo-dan-taman-wisata-komodo>
- PwC Indonesia. (2021). *Labuan Bajo Heading towards Premium Tourism*. <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/infrastructure-news/november-2021/labuan-bajo-heading-towards-premium-tourism.html>
- Rini, A. D. (2019). Digitalization in the Community-based Tourism Development in Peripheral Areas: A Case Study of Sumbermanjing Wetan Village, Malang Regency. *Journal of ASEAN Studies*. <https://doi.org/10.21512/jas.v7i2.6115>

- Sayuti, R. H. (2023). Community Readiness in Implementing Sustainable Tourism on Small Islands: Evidence from Lombok, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*. <https://doi.org/10.3390/su15129725>
- Scarpello, F. (2015). Politics, power, resources and the political economy of plural policing. In *Politics, power, resources and the political economy of plural policing*.
- Setyoko, A. T., & Kristiningrum, E. (2019). Analysis of Dive Industry Minimum Requirement Criteria Based on Risk Management. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/598/1/012050>
- Teku, L. M. K. P., Mujiati, M., & Mujiburohman, D. A. (2022). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Perbaikan Kualitas Data Pertanahan Di Kabupaten Manggarai Barat. *Perspektif*, 11(2), 779–785. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6120>
- Uğur, L. (2016). Mind the gap: Reconceptualising inclusive development in support of integrated urban planning and tourism development. In *Tourism in the City: Towards an Integrative Agenda on Urban Tourism*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26877-4_3
- Utama, W. G., Jandu, I. H., Sudirman, P. E., Peternakan, P., Katolik, U., Santu, I., Ruteng, P., Ekonomi, P. S., Katolik, U., Santu, I., Ruteng, P., & Pertanian, L. (2022). *Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian Berkelanjutan 23 Juli 2022 Fakultas Pertanian dan Peternakan, UNIKA Santu Paulus Ruteng*. 74–91.
- Wahudi, A. (2015). Quantum Leap Strategy Industri Pariwisata Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Dinamika Dan Peran Ilmu Manajemen Untuk Menghadapi AEC*.
- Wang, M., Su, M. M., Gan, C., Peng, X., Wu, Z., & Voda, M. (2023). Does digital inclusive finance matter in sustainable tourism development at the county level? Evidence from the Wuling Mountain area in China. *Sustainable Development*. <https://doi.org/10.1002/sd.2838>
- Wibowo, M. (2022). Modeling the Potential of Tsunami Hazard in Labuan Bajo Towards A Disaster-Resilient Tourism Area. *Indonesian Journal of Geography*. <https://doi.org/10.22146/ijg.71220>
- Widaningrum, A., & Damanik, J. (2016). Improving tourism destination governance: Case of Labuan Bajo City and the Komodo National Park, Indonesia. *Social Sciences (Pakistan)*. <https://doi.org/10.3923/sscience.2016.5043.5051>
- Wulandari, S., Ismanto, A., & Sugianto, D. N. (2023). Two dimensional Hydrodynamic Simulation in Labuan Bajo Waters, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1224(1), 012031. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1224/1/012031>
- Yudhoyono, E. B., Siregar, H., Achsani, N. A., & Irawan, T. (2021a). Financial performance of tourism businesses in Labuan Bajo Tourist Area, Indonesia. *Journal of Environmental Management and Tourism*. [https://doi.org/10.14505/jemt.12.2\(50\).13](https://doi.org/10.14505/jemt.12.2(50).13)
- Yudhoyono, E. B., Siregar, H., Achsani, N. A., & Irawan, T. (2021b). The impact of tourism on the economy and community welfare in Labuan Bajo area, Indonesia. *International*

Journal of Sustainable Development and Planning.
<https://doi.org/10.18280/IJSDP.160219>

Yuliana, P. R., & Suryawan, I. B. (2016). Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam Rangka Peningkatan Kunjungan Wisatawan (Studi Kasus: Daya Tarik Wisata Sangeh, Kabupaten Badung, Bali). *Jurnal Destinasi Pariwisata.*
<https://doi.org/10.24843/jdepar.2016.v04.i02.p10>

Zulherman, Tela, I. N., Ilona, D., & Zaitul. (2020). How support for heritage tourism development relates to community attachment and economic dependence on tourism - Investigating the mediating effect of community awareness. *International Journal of Innovation, Creativity and Change.*